

KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS

Oleh : Jesika Puteri

Pembimbing : Zulkarnaini

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Actions of child abuse's have increased every year in Bengkalis Regency. Therefore, the Government of Bengkalis Regency established an integrated Community-based Empowerment Center for Women and Children (P2TP2A) with the aim of providing fast, appropriate and integrated physical and non-physical services in order to provide protection for women and children who are vulnerable to violence . This study aims to get an idea of how P2TP2A performs and identify the factors that influence the performance of P2TP2A in handling child abuse in Bengkalis Regency. The theoretical concept used is the performance theory of Dwiyanto with indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This study uses a qualitative method that is descriptive, the selection of informants using the Purposive sampling technique. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the performance of Bengkalis P2TP2A has not been effective. Some influencing factors include budget, socialization, and communication. This method uses performance theory from Dwiyanto with indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. from the results of this study it was found that the performance of P2TP2A had not been effective because there were several factors that inhibited namely in the form of budget, socialization, and communication. It is better for P2TP2A to further improve the performance of Bengkalis P2TP2A Regency management starting from productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability, and need to prepare permanent staff who can stand by at any time providing services according to procedures.

Keywords : Performance, P2TP2A, Child Abuse

Latar Belakang

Maraknya kasus yang terjadi pada perempuan dan anak, pemerintah mengambil andil dalam hal ini dengan membangun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena maraknya kasus kekerasan tersebut di daerah seluruh Indonesia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mendapatkan gelar Kota Layak Anak pada Tahun 2017. Dengan adanya gelar tersebut menandakan bahwa Bengkalis merupakan kabupaten yang layak dan memenuhi standar kota layak untuk anak dan telah memenuhi beberapa Indikator yaitu :

1. Kelembagaan
2. Hak Sipil Kebebasan
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Walapun kabupaten bengkalis mendapat gelar kota layak anak pada tahun 2017 tidak menjamin bahwa kasus kekerasan kepada anak tidak ada, buktinya Kasus tindak kekerasan terhadap anak terutama pencabulan anak ataupun pelecehan seksual terhadap anak meningkat di Kabupaten Bengkalis. Kebanyakan kasus yang terjadi didaerah perdesaan yang jauh dari pusat kota

karena kurangnya wawasan sehingga banyak kemungkinan kekerasan yang terjadi dan kurangnya edukasi masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan anak yang tercatat di P2TP2A Kabupaten Bengkalis berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, penelantaran, dan trafficking. Dari Tabel 1.1. dapat dilihat ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak diantaranya kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan, penelantaran, dan trafficking. Pada tahun 2013 kasus kekerasan terhadap anak termasuk dalam beberapa perlakuan yaitu sebanyak 13 kasus, tahun 2014 sebanyak 19 kasus, tahun 2015 sebanyak 20 kasus, tahun 2016 sebanyak 44 kasus, tahun 2017 sebanyak 54 kasus. Kasus kekerasan anak di Kabupaten Bengkalis dari tahun-ketahun terus meningkat terutama kasus pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap anak yang memiliki angka tertinggi dibandingkan kasus kekerasan lainnya.

Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 di sebabkan oleh pelecehan seksual dan persetubuhan yang terbanyak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak biasanya dilakukan dibawah korban ataupun pelaku dan pelakunya pun tidak jarang masih ada hubungan keluarga maupun kerabat korban yang ada di lingkungan rumah korban, tindakan yang mendasari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan adanya faktor dari pelaku yaitu kejiwaan, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dan lingkungan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis dibentuk pada 31 Maret 2011 dibawah

naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memberikan berbagai pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran, dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Adapun tujuan pokok serta tugas pokok dan fungsi dari P2TP2A sebagai berikut :

1. Tujuan pokok
 - a. Menyediakan data terpilih menurut jenis kelamin tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
 - b. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana berbagai jenis layanan bagi perempuan dan anak, seperti data dan informasi, konseling, pendampingan pendidikan dan pelatihan, rujukan, dan sebagainya.
 - c. Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.
2. Tugas Pokok
P2TP2A merupakan wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.
3. Fungsi P2TP2A memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi antara lain :
 - a. Informasi dan Data
 - b. Rujukan
 - c. Konsultasi / Konseling
 - d. Pelatihan keterampilan

Dari beberapa fungsi P2TP2A yang telah disebutkan diatas, sejauh ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkulu masih dalam fungsi tahap Konsultasi/Konseling. Sedangkan

pelatihan keterampilan yang diberikan oleh P2TP2A saat ini belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya, P2TP2A bertugas sebagai wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, serta berfungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi antara lain : Informasi dan Data, Rujukan, Konsultasi / Konseling, Pelatihan keterampilan.

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkulu diperoleh terdapat masalah-masalah kinerja P2TP2A adapun masalah-masalah tersebut: pertama masih kurangnya pegawai di P2TP2A Kabupaten Bengkulu, agar jumlah pegawai/pengurus dalam melaksanakan penanganan kasus-kasus kekerasan dapat terselesaikan maka P2TP2A Kabupaten Bengkulu membagi divisi menjadi 3 sektor agar lebih efektif dengan menepatkan pengurus perwakilan SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Kepolisian Kabupaten Bengkulu disetiap divisi namun jumlah pegawai/pengurus tersebut untuk disetiap divisi masih kurang, terkendalanya yaitu kurangnya pegawai di divisi yang ada khususnya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Kedua belum terlaksana secara optimal persiapan yang harus dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bengkulu dalam proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual yang proses

penyelesaian mengikuti standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 01 Tahun 2010. Contohnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di P2TP2A Kabupaten Bengkalis dan di RSUD Kabupaten Bengkalis, Standar Pelayanan Minimal P2TP2A Kabupaten Bengkalis mencakup jenis pelayanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak perempuan dan anak serta penegakkan bantuan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan medis, namun di P2TP2A Kabupaten Bengkalis, Standar Pelayanan Minimal belum mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya, seperti penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitas Sosial, Penegakan Hukum serta Bantuan Hukum bagi para korban.

Ketiga koordinasi lintas sektoral yang terkait dengan P2TP2A Kabupaten Bengkalis yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Kabupaten Bengkalis, serta polisi. Dimana perwakilan lembaga strategis seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai peran penting yang cukup penting dalam keterkaitan terhadap P2TP2A Kabupaten Bengkalis. Selain itu pemerintah, swasta dan masyarakat Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bengkalis.

Keempat belum terfasilitasnya beberapa kebutuhan yang sifatnya sangat teknis untuk proses pendampingan

kepada korban atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah belum adanya ruangan fisik, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di ruangan konseling, belum adanya alat komunikasi seperti telpon atau hp khusus untuk menangani kasus kekerasan anak. Belum adanya alat transportasi khusus khusus seperti mobil untuk operasional penjemputan korban, belum adanya pendanaan untuk pendampingan petugas kelapangan, serta masih kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pemberian keterampilan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Bengkalis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kabupaten Bengkalis ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai masalah ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat mengetahui efektifitas kinerja di suatu lembaga

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak.

Konsep Teori

1. Kinerja

Menurut **Zainal (2015)**, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan yang mana untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Kinerja merupakan cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian (**Cascio, 2013**).

Menurut **Wibawa** dalam **Hayat (2017:59)**, kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi

dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai oleh yang bersangkutan, dimana hasil yang dicapai adalah uraian yang dapat ditemukan dalam aturan pembentukan organisasi melaluui visi, misi, tujuan, dan strategi yang digunakan dan diharapkan yang ingin dihasilkan

Kinerja adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja individu atau kelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma-norma, nilai-nilai ataupun standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah di tetapkan atau berlaku dalam organisasi (**Torang, 2013**).

Menurut **Mahmudi (2015)**, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 5 faktor yaitu:

- a. Faktor pribadi, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi & komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pemimpin kepada anggota lainnya.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap semua anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota lain.
- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan budaya kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor situasional, meliputi: tekanan serta perubahan

lingkungan eksternal dan internal.

Menurut **Dwiyanto** dalam **Mustafa (2013:124-125)**, indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
2. Kualitas layanan, kinerja organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas layanan, dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga muncul anggapan bahwa kinerja birokrasi sangat buruk dalam kaitannya dengan publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsibilitas secara langsung

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang dimiliki responsibilitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas, menunjukan seberapa besar kebijakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik tunduk atau memenuhi kehendak pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (elected officials). Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

2. Organisasi

Menurut **Ratnasari (2018)**, organisasi merupakan sekumpulan (social entities) yang memiliki suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktivitas yang dirkoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan lingkungan eksternal.

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi tercipta apabila beberapa orang bergabung secara

bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (**Hery, 2018**).

Menurut **Fahmi (2017)**, organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan erbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya

Menurut **Robins** dalam **Ratnasari (2018)**, organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus berupaya mencapai suatu sasaran. Ada beberapa unsur penting organisasi yaitu :

1. Kumpulan (antitas sosial)
2. Sistem
3. Koordinasi
4. Kerjasama
5. Tujuan/sasaran

Menurut **Kochler** dalam **Widodo (2018)**, organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pandangan lain bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlihat secara bersama-sama didalam hubungan yang formal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut **Widodo (2018)**, organisasi sebagai suatu bentuk hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti organisasi ini selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi . Ada beberapa faktor intern dan intern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi, yaitu :

1. Faktor Intern :

- a. Perubahan kebijaksanaan pimpinan
- b. Perubahan tujuan dan sasaran
- c. Pemekaran/perluasan wilayah operasi organisasi
- d. Volume kegiatan yang bertambah banyak
- e. Tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi
- f. Sikap dan perilaku dari para anggota organisasi
- g. Berbagai macam pengetahuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi sehingga menjadi pertimbangan

2. Faktor ekstern

- a. Politik, yang berhubungan dengan pemerintah, organisasi politik
- b. Hukum, meliputi semua ketentuan yang berlaku yang harus ditaati oleh setiap orang baik secara individu maupun kelompok, mulai dari ketentuan hukum yang tertinggi sampai dengan hukum yang terendah
- c. Kebudayaan, meliputi kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial
- d. Teknologi, segenap hasil kemajjuaan dan teknik perkembangan industri peralatan modern
- e. Sumber daya alam, meliputi segenap potensi sumber alam baik dari darat, laut, maupun udara, berupa tanah, air, energi, flora, fauna, dan lain-lain termasuk pula geografi dan iklim
- f. Demografi, meliputi sumber pegawai yang tersedia dalam masyarakat, yang dapat diperinci melalui jenis kelamin, tingkat

umur, jumlah dan bagaimana sistem penyebarannya

- g. Sosiologi, adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok tau ilmu tentang masyarakat

Menurut **Hasibuan** dalam **Badrudin (2013:116)**, macam-macam organisasi dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses pembentukannya
 - a. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART. Kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya adalah kegiatan (hubungan) jabatan sebagai diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis.
 - b. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuannya juga tidak jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak ada dan hubungannta-hungungan terjalin secara pribadi (personal / private relationship bukan formal relationship)
2. Berdasarkan skala (ukuran) besar kecilnya
 - a. Organisasi besar
 - b. Organisasi sedang (menengah)
 - c. Organisasi kecil
3. Berdasarkan tujuannya
 - a. Publik organization (organisasi sosial) yaitu organisasi non profit yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi laba

- b. Business organization (organisasi perusahaan) adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial (mendapatkan laba) dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba (*profit motive*)

4. Berdasarkan *Organization char-*nya
 - a. Berbentuk segitiga vertical (*arrangement chart*)
 - b. Berbentuk segitiga horizontal
 - c. Berbentuk kerucut
 - d. Berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran
 - e. Berbentuk bulat telur (oval)
5. Berdasarkan tipe-tipe bentuknya
 - a. Organisasi lini
 - b. Organisasi lini dan staff
 - c. Organisasi fungsional
 - d. Organisasi lini, staff dan fungsional

Menurut **Subekhi dan Jahuar (2013:127)**, untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ada 4 fungsi yang sangat perlu diperhatikan dalam organisasi yaitu :

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pengawasan,
4. Pelaporan

Menurut **Subekhi dan jahuar (2013: 127)**, ciri-ciri suatu organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang diterapkan
- b. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
- c. Secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun
- d. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relative dapat didefinisikan

Menurut **Fahmi (2017)**, organisasi sebagai salah satu bentuk hubungan yang punya sifat dinamis, dalam arti dapat

menyesuaikan diri kepada perubahan yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudah diperhitungkan. Ada beberapa bentuk organisasi yaitu:

- a. Organisasi garis
- b. Organisasi fungsional
- c. Organisasi garis dan staf

Metode Penelitian

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan Kinerja P2TP2A Kabupaten Bengkalis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan untuk lokasi penelitian ini karena Kabupaten Bengkalis mendapat gelar Kota Layak Anak pada tahun 2017, tetapi faktanya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis semakin meningkat.

Informan Penelitian

Dalam penelitian yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua P2TP2A Kabupaten Bengkalis

2. Pengurus P2TP2A / Petugas Sekretariat
3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis (DPP PA)
4. Sekretaris P2TP2A
5. Masyarakat
6. Klien P2TP2A

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara (interview)
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2TP2A) Dalam Kasus Tindak Kekerasan Anak di Kabupaten Bengkalis. Data jssuga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak
2. Keputusan Bupati Nomor : 147/KPTS/III/2011
3. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Anak dari P2TP2A

Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (Jurnal). Data lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti data kekerasan anak di Kabupaten Bengkalis yang sudah dilakukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak(P2TP2A).

Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan.

Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti akan membahas hasil penemuan lapangan terkait dengan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis dalam penanganan kasus kekerasan anak yang mengacu pada dimensi kinerja

menurut Agus Dwiyanto. Dimensi kinerja yang dimaksud ialah produktivitas, kualitas pelayanan, reponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat dikatakan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang belum optimal. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan masih harus diperbaiki dalam peningkatan kinerja P2TP2A kedepan yang mana hal ini akan dibahas berdasarkan indikator-indikator yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut.

1. Produktivitas

Produktivitas adalah salah satu indikator yang penting untuk mengatur kinerja dari suatu organisasi, karena produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi namun juga efektifitasnya. Produktivitas dapat juga dipahami sebagai rasio antara input dengan output dari suatu organisasi, dimana input dan output tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana organisasi telah mencapai produktivitasnya yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis saat ini masih kurang optimal. Berkaitan dengan input organisasi seperti SDM dan anggaran operasional yang dimiliki P2TP2A Kabupaten Bengkalis masih belum memadai. Sedangkan untuk outputnya seperti kasus dan keefektifan penyelesaian kasus pun masih memerlukan pengoptimalan lagi, meski

ketuntasan kasus yang ditangani P2TP2A Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan sudah baik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai sejauh mana organisasi publik telah memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat sejauh mana P2TP2A sebagai wahana pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak telah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing client atau korban berdasarkan kasus yang dialami. Selain itu bagaimana sarana serta prasarana dari P2TP2A itu sendiri diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas layanan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis masih belum optimal dilihat dari aspek kemudahan akses layanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan serta kualitas dari pelayanan yang diberikan. hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui kehadiran dari lembaga P2TP2A Kabupaten Bengkalis. Disamping itu, belum teralisasinya sarana dan prasarana yang menunjang penting kinerja P2TP2A Kabupaten Bengkalis seperti ruangan-ruangan khusus sampai dengan kendaraan operasional tetap serta fasilitas yang menjadi kendala bagi P2TP2A Kabupaten Bengkalis untuk memaksimalkan pelayanan dan yang terpenting adalah kepuasan pelayanan bagi korban/klien yang harus lebih

diperhatikan sesuai dengan kasus-kasus yang dialaminya.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas layanan dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu dibahas mengenai sejauh mana P2TP2A telah memberikan respon kebutuhan korban dan apa saja program yang telah dilakukan P2TP2A Kabupaten Bengkalis.

dapat dilihat bahwa P2TP2A Kabupaten Bengkalis sangat membutuhkan dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, sampai dengan Dinas Pendidikan. berharap instansi terkait dapat memperkenalkan P2TP2A Kabupaten Bengkalis ke masyarakat juga, seperti memperkenalkan apa lembaga P2TP2A Kabupaten Bengkalis, Tugasnya, Fungsinya sampai dengan program-program P2TP2A Kabupaten Bengkalis itu, sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk lebih mengenal P2TP2A Kabupaten Bengkalis.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau

sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya, P2TP2A Kabupaten Bengkalis akan melakukan koordinasi atau jejaring dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Unit PPA Polresta serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap perempuan dan anak.

dapat diketahui bahwa tanggungjawab P2TP2A belum terlaksana dengan baik dan tidak ada penanganan awal yang secara tanggap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera dilakukan penanganan lanjutan terhadap kasus mengenai hak-hak atas perlindungan anak.

Dari informasi diatas, dapat disimpulkan keaktifan dari lembaga P2TP2A Kabupaten Bengkalis sangatlah penting. Apalagi ternyata memang ada klien korban yang ingin melapor dari lokasi-lokasi yang masih memerlukan perhatian dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kejahatan terhadap anak.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai

dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan dianggap benar dan sesuai dengan nilai norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dapat dianalisa atau disimpulkan bahwa Akuntabilitas dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis tersebut peneliti menyoroti pada bentuk pertanggungjawaban kinerja dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Bentuk pertanggungjawaban tersebut ialah laporan rutin yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten Bengkalis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pengembangan kawasan Wisata Kecamatan rupan Utara Kabupaten Bengkalis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bengkalis

Dilihat dari produktivitas P2TP2A Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan tenaga relawan atau pengurus yang dimiliki oleh P2TP2A Kabupaten Bengkalis masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kepastian waktu serta anggaran operasional yang juga belum memadai. Kualitas layanan dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum

mengetahui keberadaan lembaga P2TP2A serta masih adanya sarana dan prasarana penting yang belum terealisasi. Disamping itu masih terdapat klien/korban yang belum puas terhadap pelayanan dari P2TP2A Kabupaten Bengkalis karena kebutuhan pendampingan bagi kasusnya tidak terpenuhi. Masih kurangnya responsifnya P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan klien/korban serta program sosialisasi yang masih perlu dioptimalkan dan koordinasi berbagai sektor/instansi yang masih kurang. Dilihat dari segi akuntabilitas P2TP2A Kabupaten Bengkalis terkait pelaporan kasus masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelaporan yang belum detail (tidak lengkap) serta belum tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja P2TP2A dalam Penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bengkalis

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kinerja P2TP2A Kabupaten Bengkalis yaitu baik dari segi anggaran yang mana anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tindak kekerasan serta memberi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Selain dari anggaran ada juga sosialisasi yang berkaitan dengan peran-peran yang harus dijalani oleh P2TP2A Kabupaten Bengkalis yaitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta sekolah-sekolah yang dinilai masih kurang optimal karena masih banyak yang belum mengetahui apa dan bagaimana peran P2TP2A tersebut ditengah masyarakat. Dari segi komunikasi belum terjalin komunikasi yang efektif antara P2TP2A dengan pihak yang terkoordinir dalam penyampaian pesan ataupun kerjasama yang baik dalam penanganan

serta menganalisis kasus kekerasan terhadap anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis agar dalam menangani kasus kekerasan anak dapat berjalan dengan optimal, yaitu:

Lebih meningkatkan lagi kinerja pengurus P2TP2A Kabupaten Bengkalis sesuai dengan beberapa indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas, serta perlu menyiapkan staf tetap yang bisa *stand by* setiap saat memberikan pelayanan sesuai prosedur dan segera melakukan tindakan terhadap kasus yang masuk dan bertanggung jawab atas berjalannya kasus serta mendampingi dan menyiapkan diri korban untuk dapat kembali bermasyarakat sesuai dengan tujuan dasar. Mencari solusi terbaik dalam pemenuhan kebutuhan yang sangat penting seperti anggaran yang menyebabkan pemberian pelayanan yang kurang maksimal. P2TP2A juga perlu lebih intens dalam eksistensi lembaga agar dapat hadir ditengah-tengah masyarakat, seperti memberi edukasi atau sosialisasi tentang kekerasan anak, bagaimana menyikapi, dan kemana harus meminta bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Said, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Selemba Humnika.

- Aradana, K. Dkk. 2009. *Perilaku Keorganisasian Yogyakarta* : Graha Ilmu
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Bangunan, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Erlangga
- Hasibuan, Melayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Iswanto, Bambang. 2008. *Kinerja Birokrasi*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2006. *Prilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: PT. Erlangga
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Lubis,S.B. Hari dan Martani Huseini. 2009. *Pengantar Teori Organisasi. Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi , FISIP UI. Bab 3
- Manullang,2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : Unit Percetakan dan Penerbit Sekolah Tinggi YKPN
- Marnis, 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Urni Press
- Sundari, Mimin. *Perilaku Organisasi*. Pekanbaru : UR Press
- Nugroho, Riant. 2014. *Publick Policy*. Jakarta: Ellex Media Komputindo..
- Ruliana, Poppy. 2016. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ruzikna. 2009. *Manajemen Perubahan*. Pekanbaru : CV. Witra Irzani Pekanbaru
- Subekhi, A. dan Jahuar Muhammad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- dan Mixed*, edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dokumen :**
1. Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
 2. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) P2TP2A Kabupaten Bengkalis

Jurnal :

1. Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)). *Ejournal Fisip Unmul*, Vol.1 No.3 , 1094–1106.
2. Puspita Sari, Dwita. 2017. Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jom Unri*, Vol.4 No.2